

**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP
PENINGKATAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN AMURANG
BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Dyna Maryanti Tahupiah

Joyce. J. Rares

Martha Ogotan

***ABSTRACT :** Waste problems has received serious attention from various parties, so it has been placed as one of the main issues for local governments throughout Indonesia. So this is indicated by the enactment of law No.18 Of 2008 on waste management. Garbage growth was in line with the population growth rate continues grow naturally in respect of this study to answer the Question “How Far The Effect Of Policy Implementation Of Waste Management Of Environmental Hygiene In Western Sub-District Amurang, South District Minahasa”.*

Refers to the finding in this study, it is necessary to put forward some suggestion, such as: (1) to improve the effectiveness of waste management through waste management system policy, particularly in the western sub-district Amurang, the cleanliness and landscape management office needs to request the addition of organizational resources. (2) considering the dimensions of the implementation of the communication is still not optimal, it is suggested that the local government together with other stakeholders who handle trash build better communication.

***Keywords:** Policy Implementation, Environmental Hygiene*

PENDAHULUAN

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia, karena setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Pola pengelolaan sampah saat ini masih menganut paradigma lama di mana sampah dianggap sebagai sesuatu yang tak berguna, dan tidak bernilai ekonomis, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Bagi setiap kota besar, termasuk setiap daerah, masalah sampah merupakan salah satu aspek yang cukup pelik. Penanganan sampah di perkotaan maupun di daerah pusat aktivitas masyarakat menjadi masalah yang cukup serius dirasakan mengingat

volumenya yang kian hari kian membengkak atau bertambah sementara kemampuan aparat pemerintah dalam melayani sangat terbatas. Hal ini berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu beserta aktivitasnya menyebabkan meningkatnya sampah bukan hanya dalam jumlah sampah tetapi juga dari variasi komposisi sampah, disamping itu diperkuat juga dengan kecenderungan masyarakat modern untuk menghasilkan berbagai macam sampah khususnya perilaku hidup masyarakat yang semakin konsumtif.

Permasalahan sampah telah mendapat perhatian serius dari

berbagai pihak, sehingga telah menempatkannya sebagai salah satu isu utama bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sehingga hal ini diindikasikan dengan berlakunya UU. No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pertumbuhan sampah terjadi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah secara alami. Pertumbuhan penduduk yang demikian besar sudah barang tentu akan menjadi masalah bagi pemerintah daerah, terutama jika dilihat dari jumlah timbunan sampah yang besar, serta pencemaran yang akan diakibatkan oleh tumpukan sampah yang tidak terangkut. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengatasi masalah ini sebaik-baiknya, agar tidak sampai pada tahap mencemari lingkungan.

Gambaran permasalahan sampah sebagaimana dikemukakan di atas, setidaknya terdapat pula di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sebagai lokasi penelitian ini. Oleh sebab itu perlu dicari penyelesaiannya yang optimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Struktur, Tugas dan Fungsi Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Selatan, yang salah satu tugas pokoknya adalah mengelola kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Besarnya volume sampah yang dibuang setiap hari bertambah dari tahun ke tahun, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan penyediaan lahan semakin terbatas untuk tempat penampungan sampah.

Data hasil pra survei menunjukkan bahwa volume sampah dapat diangkut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa

Selatan baru dapat diangkut hanya sebesar $\pm 30\%$ dari volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat produsen sampah setiap harinya, sementara sisanya sebesar $\pm 70\%$ tidak dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Itupun hanya terdapat di dua kelurahan yang berada di jalur jalan Trans Sulawesi, yakni Kelurahan Rumoong Bawah dan Kelurahan Kawangkoan Bawah.

Indikasi permasalahan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan armada pengangkut sampah, TPA dan TPS yang tersedia. Data terakhir menunjukkan bahwa hanya disiapkan 5 (dua) unit Damp Truck dengan daya angkut 6 Ton per hari, namun 2 unit dalam keadaan rusak, sedangkan TPA hanya satu lokasi di desa Mobongo Kecamatan Amurang Barat belum dapat difungsikan (belum berfungsi efektif), sementara TPS yang disediakan sepanjang jalur Trans Sulawesi, yang dilalui dua Kelurahan sebagai produsen sampah dalam bentuk drum sering dicuri orang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah belum memberikan kontribusi yang berarti bagi kebersihan lingkungan, khususnya di Kecamatan Amurang Barat. Hal ini diduga karena belum karena implemtnasi kebijakan sistem pengelolaan sampah yang belum optimal, terutama dari sisi dimensi-dimensinya, seperti komunikasi (sosialisasi) tentang tujuan dan sasaran program belum terkomunikasikan dengan baik/lancar, baik secara internal pelaksana maupun secara eksternal (kepada masyarakat produsen sampah), sumberdaya (petugas pengelola sampah), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas belum memadai, sarana dan

prasaran/peralatan pendukung pelaksanaan program kurang memadai, sikap aparat pelaksana, termasuk pegawai staf Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Selatan, kurang mendukung dan struktur birokrasi pengelolaan sampah, dalam arti prosedur dan mekanisme pengelolaan sampah yang belum secara optimal efektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya pemahaman kembali bagi *stakeholder* terkait dengan apa yang di maksud tentang implementasi kebijakan serta bagaimana sistem pengelolaan sampah yang baik. Mempelajari implementasi kebijakan publik sangat krusial dan komplek dalam prespektif administrasi publik dan kebijakan publik, hal ini berkaitan dengan aspek kebijakan itu sendiri yang tidak terlepas hubungannya dengan berbagai kelembagaan dalam suatu system pemerintahan dan aspek masyarakat sebagai objek kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III, (1980:1), bahwa :

“The study of public policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy of the people whom it affects.”

Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun *stakeholder*-nya, sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2009 : 39):

“... pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauhmana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan”.

Teori kebijakan publik mementingkan aspek konkrit dari metode dan prosedur manajemen. Teori kebijakan publik tidak hanya mempersoalkan manusia sebagai tenaga pendorong dan penggerak, lembaga-lembaga dan proses kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, maka ilmu kebijakan publik bersifat dinamik, karena mempunyai sifat dinamik, maka cenderung konsepsional.

Kecenderungan konsepsional meliputi pula kepada tata cara kinerja yang dilakukan oleh implementator suatu kebijakan. Tata cara kinerja tersebut dituangkan ke dalam suatu mekanisme kerja yang disusun secara bertanggung jawab sesuai dengan maksud dan tujuan dari suatu kebijakan serta dapat dipahami dan digunakan sebagai rujukan dalam implementasi kebijakan.

Sedangkan berbicara tentang sistem pengelolaan sampah Banyak sekali pengertian mengenai sampah atau limbah padat. Sampah merupakan produk samping dari aktivitas manusia sehari-hari, dan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tumpukan sampah yang semakin banyak. Menurut UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Atau bisa juga diartikan sebagai "Sampah adalah semua buangan yang timbul akibat aktivitas manusia dan hewan yang biasanya berbentuk padat yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi (tchobanoglous, 1993 dalam Anonimus, 2010).

Hampir senada dengan pendapat tersebut, Azwar (1998) mengatakan bahwa "sampah dalam pengertian ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya merupakan sebagian dari benda yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup".

Sumber sampah pada umumnya berkaitan dengan tata guna lahan, seperti daerah perumahan, perkantoran, kawasan komersial, dan lain-lain sehingga sumber-sumber sampah ini dapat dikembangkan sejalan dengan pengembangan tata guna lahannya. Ada beberapa kategori sumber sampah yang dapat digunakan sebagai acuan (Anonimus, 2010), yaitu :

1. Sumber sampah yang berasal dari daerah perumahan. Contoh: perumahan masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah.

2. Sumber sampah yang berasal dari daerah komersial. Contoh: pasar, pertokoan, hotel, restoran, bioskop, industri, dll.
3. Sumber sampah yang berasal dari fasilitas umum. Contoh: perkantoran, sekolah, rumah sakit, taman, jalan, saluran atau sungai, dll.
4. Sumber sampah yang berasal dari fasilitas sosial. Contoh: panti-panti sosial dan tempat-tempat ibadah.
5. Dari sumber-sumber lain.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sistem pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan sampah (sumber timbulan sampah) sampai ke tempat pengumpulan sementara (TPS) atau stasiun pemindahan atau langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA). Hal yang mempengaruhi pola pengumpulan adalah jumlah penduduk, luas daerah operasi, kepadatan penduduk, tingkat penyebaran rumah di daerah pelayanan, dan kondisi fisik alam daerah pelayanan, seperti panjang dan lebar jalan, kondisi sarana penghubung, jalan objek pengumpulan dengan lokasi pemindahan, waktu rit operasi. Prinsip penanganan sampah adalah membersihkan lingkungan dari sampah yang dihasilkan dan mengamankan sampah tersebut di tempat pembuangan akhirnya agar tidak mencemari lingkungan. Pola pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah pewadahan atau pemilahan.

Kunci keberhasilan program kebersihan dan pengelolaan sampah terletak pada pemilahan. Tanpa pemilahan, pengolahan sampah menjadi

sulit, mahal dan beresiko tinggi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Pemilahan adalah memisahkan antara jenis sampah yang satu dengan jenis yang lainnya. Minimal pemilahan menjadi dua jenis : sampah organik dan non organik. Sebab sampah organik yang menginap satu hari saja sudah dapat menimbulkan bau, namun tidak demikian halnya dengan sampah non organik.

Berbicara Kebijakan Sistem pengelolaan sampah adalah kebijakan yang desentralistik yang pokok-pokoknya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan di Kabupaten Minahasa Selatan diatur dalam Peraturan daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Struktur, Tugas dan Fungsi Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Selatan, yang salah satu tugas pokoknya adalah mengelola kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah.

METODE PENELITIAN

A. Metode yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei adalah penelitian yang diadakan pada suatu populasi. Data yang diteliti adalah data dari sampel, yaitu sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2002). Dalam penelitian survei, informasi/data dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Umumnya pengertian survei dibatasi pada pengertian survei sampel dimana informasi dikumpulkan dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi. (Singarimbun dan Effendi, 1988).

B. Definisi Konsep dan Operasional

Berdasarkan rumusan hipotesis, maka penelitian ini akan mengkaji dua variabel pokok, masing-masing (1) satu perangkat variabel bebas (*Independent variable*) yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang diberi simbol X; dan (2) sebuah variabel terikat atau *dependent variable* yakni kebersihan lingkungan yang diberi simbol Y.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua karakteristik yang terkait dengan implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun anggota populasi terdiri dari :

- a. Pegawai Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 32 orang
- b. Petugas Lapangan pengelola sampah sebanyak 31 orang
- c. Masyarakat produsen sampah sebanyak 1.601 KK, yang tersebar di dua kelurahan (jalan Trans Sulawesi), masing-masing :

- 1) Kelurahan Rumoong Bawah sebanyak
- 2) Kelurahan Kawangkoan Bawah sebanyak

unsur masyarakat produsen ditarik secara ratio dengan petugas lapangan sehingga anggota sampel untuk unsur masyarakat produsen sampah sebanyak (51.65) KK dibulatkan menjadi 52 KK.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjangkau data primer adalah daftar pertanyaan atau kuesioner serta dibantu dengan teknik wawancara yang dipandu melalui pedoman wawancara atau *interview-guide*. Untuk

memperoleh data sekunder digunakan penelitian dokumentasi dan semua data dikumpulkan melalui teknik survei dan observasi langsung dilokasi penelitian (Hadi, 1989).

Instrumen (kuesioner) dirancang secara berstruktur berdasarkan skala Likert dan berpola pada skala ordinal dan interval

D. Teknik Analisis Data

Untuk keperluan pengujian hipotesis, maka teknik analisis data yang relevan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel Tak bebas digunakan analisis korelasi *product moment* dengan langkah-langkah berikut ini :
 - a. Menghitung koefisien korelasi digunakan rumus r-Pearson yang dimodifikasi oleh Sudjana (1983)
 - b. Untuk mengetahui derajat determinasi (daya penentu) dari variabel Bebas terhadap variabel terikat, diperoleh dengan cara mengkwadratkan harga/nilai koefisien korelasi, yaitu $(r)^2$.
 - c. Untuk uji signifikansi hubungan antara variabel, maka nilai r-hitung langsung dikonsultasikan dengan nilai r-tabel pada taraf uji tertentu dengan $dk = n$.

Apabila hasil uji dinyatakan signifikan, maka akan dilanjutkan dengan analisis regresi parsial (regresi sederhana) dengan menyelesaikan persamaan $\hat{Y} = a + bX$ (Sugiyono, 2002). Teknik analisis ini digunakan untuk menguji pola hubungan fungsional antara variabel-variabel bebas secara terpisah (parsial) terhadap variabel terikat.

2. Aturan Penerimaan Hipotesis : Hipotesis dapat diterima, apabila hasil uji menunjukkan signifikan pada taraf uji 1 % ($\alpha : 0,01$)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa hipotesis, yang menyatakan bahwa “Besarnya pengaruh implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah di kecamatan Amurang Barat terhadap kebersihan lingkungan ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, sikap aparatur dan struktur birokrasi Kantor Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Selatan”, telah teruji keberlakuannya secara empiris dengan sangat meyakinkan melalui analisis regresi sederhana dan korelasi *product moment*.

Berdasarkan hasil analisis korelasi *product moment* diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,772 dan koefisien determinasi, diperoleh (r^2) sebesar 0,595. Hal ini bermakna bahwa kuatnya keterkaitan antara variabel Implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah dengan kebersihan lingkungan, diperoleh sebesar 77,2 % dan kuatnya daya dukung atau daya penentu Implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah terhadap kebersihan lingkungan pemukiman masyarakat di Kecamatan Amurang barat, diperoleh sebesar 59,5 %. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pengaruh Implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah terhadap kebersihan lingkungan pemukiman masyarakat sebesar 59,5%, sedangkan sisanya sebesar 40,5 % ditentukan oleh

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Persamaan regresi yang diperoleh menjelaskan lebih lanjut tentang adanya fakta empirik bahwa antara Implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah memiliki karakteristik perkembangan yang linear atau sejajar dengan peningkatan kondisi kebersihan lingkungan pemukiman masyarakat, khususnya di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

Hasil penelitian ini berimplikasi penting terhadap langkah-langkah strategis yang hendak diambil oleh pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, terutama berkaitan dengan masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan sistem pengelolaan sampah, khususnya dimensi-dimensi komunikasi, sumber daya organisasi dan struktur birokrasi pelaksana kebijakan. Hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya organisasi KKP Kabupaten Minsal adalah sumber daya manusia, yakni personil pelaksana kebijakan, baik dari sisi kuantitas (jumlah) maupun kualitas, tampaknya belum memadai, sementara unsur sumber daya organisasi lainnya adalah biaya operasional yang relatif masih belum mencukupi dan peralatan pendukung dilapangan, seperti Dump Truck, Dump Truck Amroll, dan Motor sampah, masih jauh dari memadai. Selain itu kebutuhan peralatan di tempat pembuangan Akhir (TPA), seperti Exavator dan Louder perlu penambahan dan peremajaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebagaimana telah

dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Dari empat dimensi implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah, ternyata hanya satu dimensi yang berada pada kategori “tinggi”, yakni dimensi disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, sementara tiga dimensi lainnya masih berada pada kategori “sedang”. Namun demikian, secara keseluruhan, implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah berada pada kategori “sedang”.
2. Implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebersihan lingkungan pemukiman masyarakat, khususnya di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah teruji kebenarannya secara empiris, sekaligus dapat menjustifikasi teori-teori yang mendasarinya.

B. Saran-Saran

Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mengemukakan beberapa saran, antara lain :

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah melalui kebijakan sistem pengelolaan sampah, khususnya di Kecamatan Amurang Barat, maka Kantor Pengelolaan kebersihan dan Pertamanan perlu mengajukan permintaan penambahan sumber daya organisasi, yang meliputi :
 - a. Penambahan personil/pegawai tetap/organik sesuai kebutuhan, baik jumlah

maupun kualitas/skill yang sesuai dengan bidang tugas pengelolaan sampah.

- b. Penambahan peralatan pendukung, baik lapangan maupun tempat pembuangan akhir (TPA)
2. Mengingat masih belum optimalnya pelaksanaan dimensi komunikasi, maka disarankan

agar pemerintah daerah bersama stakeholder lainnya yang menangani masalah sampah membangun komunikasi yang lebih intensif yang terbuka serta sifatnya dua arah sehingga penanganan masalah sampah dapat diatasi dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M.Sy. 1988. Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Anonimous, 2010, <http://usedetroit.blogspot.com/2010/01/> Proses-Persamapahan di Kecamatan Sario, Manado.

Edwards III, George C, Implementing Publik Policy. 1980 Congresinal, Quartely press

Saefullah, Djadja H. A., 2009. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik. Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan ketiga, LP3AN FISIP UNPAD, Bandung.

Hadi, S., 1989, *Metodology Research* (untuk penulisan paper, skripsi, thesis dan desertasi), Jilid III, Cetakan kesepuluh, Andi Offset, Yogyakarta.

Azwar, Azrul. 1998. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara

Singarimbun, M. dan S. Effendy, 1988, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.

Sudjana, 1983, *Teknik Analisis Regresi Dan Korelasi* (Bagi Para Peneliti), Tarsito, Bandung.

Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Suradinata, Ermaya, 1994. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan, Bandung: Ramadhan

Sumber lain :

Undang-Undang RI, No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan (UUPL, 1997),

Undang-Undang RI, No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Struktur, Tugas dan Fungsi Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Selatan